

Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung (*The Influence of SiLPA and PAD on Budget Absorption in Lampung Province*)

Sekar Sitaesmi¹, Heru Wahyudi^{2*}

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2}

heru.wahyudi@feb.unila.ac.id^{2*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 30 Agustus 2022

Revisi 1 pada 5 September 2022

Revisi 2 pada 15 September 2022

Disetujui pada 25 September 2022

Abstract

Purpose: This study aims to see the effect of SiLPA and PAD on budget absorption in Lampung Province in 15 districts/cities in 2018

Research methodology: The analytical method used in this study is the Panel Data Analysis method with the FEM (Fixed Effect Model) model with the independent variables being the remaining budget for the current year, the remaining budget for the previous year and local revenue.

Results: The results of this study indicate that Local Revenue has a positive and significant effect on budget absorption in 15 districts/cities of Lampung Province, and the remaining budget for the current year has a negative and significant effect on budget absorption in 15 districts/cities of Lampung Province, while the remaining budget for the previous year has a negative and insignificant effect on budget absorption in 15 districts/cities of Lampung province.

Limitations: The limitation of this study is that it is only in 15 districts/cities in the province of Lampung and uses 2018 data

Contribution: This research is expected to provide input and contribute information in budgeting policy-making and APBD implementation to maximize budget absorption.

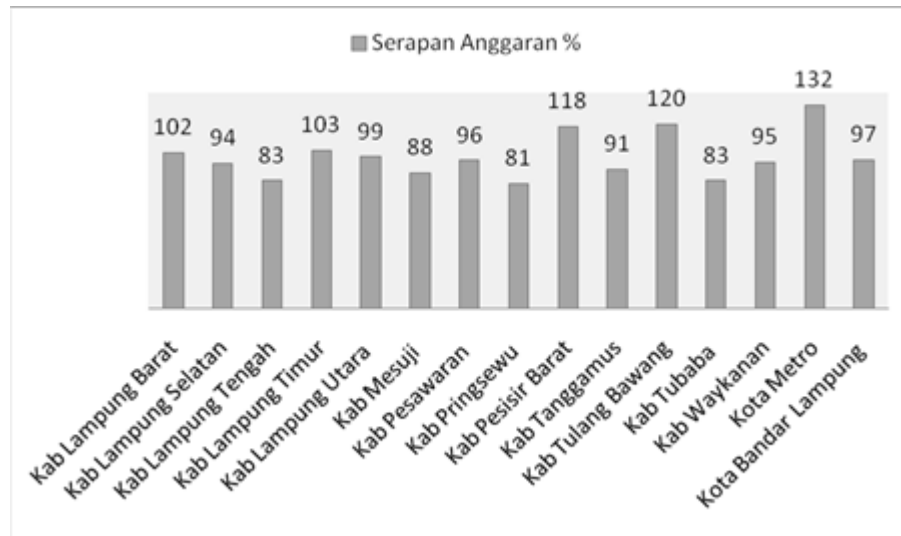
Keywords: *Budget Absorption, Previous Year's Remaining Budget, Regional Original Revenue, Remaining Current Year's Budget*

How to cite: Sitaesmi, S., & Wahyudi, H. (2022). Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(1), 29-44.

1. Pendahuluan

Lambatnya penyerapan anggaran menjadi fenomena klasik di pemerintahan. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada akhir tahun namun rendah di awal tahun. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi *inefisiensi* dan *inefektivitas* pengalokasian anggaran (BPKP 2011). Minimnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah sebagai buruknya kinerja birokrasi. Penyerapan anggaran penting untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* terhadap ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maini, Abdullah, and Zuraida (2020) Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh, menyatakan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran dan waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menyatakan bahwa lambatnya pengesahan APBD merupakan faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD.



Gambar 1. Serapan Anggaran Provinsi Lampung 15 Kabupaten/Kota Tahun 2018 (dalam persen).
Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018. (Data diolah)

Pada Tahun 2018, 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memiliki persentase serapan anggaran yang berbeda-beda dengan nilai serapan anggaran kabupaten paling tinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang sebesar 120 persen, Kabupaten Pesisir Barat sebesar 118 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar 103 persen dan Kabupaten Lampung Barat sebesar 102 persen. Sedangkan untuk tingkat serapan anggaran paling rendah adalah Kabupaten Pringsewu sebesar 81 persen, Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat sebesar 83 persen, untuk 2 kota yang berada di Provinsi Lampung serapan anggaran paling tinggi adalah Kota Metro sebesar 132,32 persen lebih tinggi dari Ibu Kota Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dengan serapan anggaran sebesar 97,02 persen. Terdapat 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki serapan anggaran kurang dari seratus persen.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 21). APBD memiliki fungsi perencanaan yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Halim 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Struktur APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III 2018, perkembangan keuangan daerah Provinsi Lampung dalam data realisasi APBD menunjukkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp 4,69 triliun atau 57,81% dari target anggaran belanja 2018. Secara nominal dan persentase, realisasi anggaran belanja di periode ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,55 triliun atau sebesar 44,80%, terutama didorong oleh kenaikan belanja operasi, khususnya pada komponen belanja barang dan jasa dan belanja subsidi, yang pada tahun 2017 tidak dianggarkan. Kenaikan juga tercatat pada belanja tidak terduga dan belanja transfer. Struktur APBD Provinsi Lampung tahun 2017-2018 Triwulan III:

Tabel 1. Struktur APBD Provinsi Lampung Tahun 2017-2018 dalam (Miliar Rupiah)

No	Uraian	APBD 2017	Realisasi Tw III 2017		APBD 2018	Realisasi Tw III 2018	
			Rupiah	%		Rupiah	%
1	Pendapatan	7,72512	3,948.6	51,1	7,507.9	4,909.	65,4
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,803.3	1,505.8	48,8	3,179.6	2,179.	68,5
	Dana Perimbangan	4,601.1	2,435.2	52,9	4,292.5	2,726.	63,5
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43.06	7.50	17,4	35.71	3.77	10,5
2	Belanja Daerah	7,914.4	3,545.4	44,8	8,112.6	4,689.	57,8
	Belanja Oprasional	4,768.8	2,908.4	60,9	4,881.2	3,409.	69,8
	Belanja Modal	1,678.4	443.54	26,4	1,769.0	718.9	40,6
	Belanja Tidak Terduga	28.00	3.18	11,3	5.00	1.28	25,6
	Transfer	1,439.0	190.27	13,2	1,457.4	560.1	38,4
Surplus/Defisit		(189.31)	186.92		(604.8)	220.1	

Sumber: KEKR Provinsi Lampung periode Tahun November 2017-2018

Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III 2018 tercatat mencapai Rp 4,91 triliun atau 65,40% dari target penerimaan tahun 2018. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,95 triliun atau 51,11% dari target APBD tahun 2017 (Tabel 1). Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan realisasi beberapa pos pendapatan pada komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kenaikan juga disumbang oleh pos dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) pada komponen dana perimbangan dan pos pendapatan hibah pada komponen lain-lain PAD yang sah.

Selain APBD serapan anggaran daerah dipengaruhi oleh variabel SiLPA. SiLPA selalu berkitan dengan pembiayaan. Ada fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan daerah belakangan ini, yakni seringnya terjadi sisa anggaran (SiLPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya Pemda telah menetapkan prediksi akan terjadi defisit, yakni pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Pada praktiknya, APBD yang deficit tidak selalu deficit dalam pertanggung jawabannya. Artinya, LRA bisa saja surplus, yakni pendapatan yang terealisasi lebih besar daripada belanja yang terealisasi. Faktor penyebab SiLPA terjadi sejak proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran. Dari sisi penganggaran, SiLPA terjadi karena senggang ananggaran (budgetary slack) baik di sisi pendapatan maupun belanja.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota anggaran dan realisasi dari setiap kabupaten dan kota berbeda-beda. Ketika SiLPA besar hal ini menunjukkan bahwa belanja atau kegiatan yang ditargetkan pada tahun anggaran berjalan tersebut tidak 100% tercapai, sehingga daya serapan anggaran semakin rendah. Semakin rendah serapan anggaran maka semakin buruk kinerja pemerintah daerah tersebut.

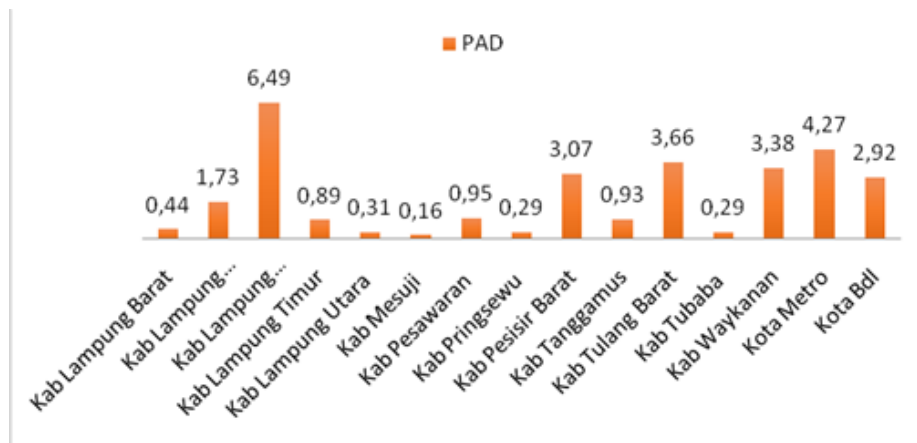
Tabel 2. Sisa Anggaran Tahun Berjalan dan SiLPA di Tahun sebelumnya (t-1) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018. (Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	SiLPAt (%)	SiLPAt-1 (%)
Kab Lampung Barat	0,783	0,771
Kab Lampung Selatan	1,713	0,853
Kab Lampung Tengah	1,524	1,414
Kab Lampung Timur	0,614	0,801
Kab Lampung Utara	1,213	0,981
Kab Mesuji	1,950	1,073
KabPesawaran	1,946	1,169
KabPringsewu	1,970	1,088
KabPesisir Barat	1,023	1,194
KabTanggamus	1,628	1,310
KabTulang Barat	0,537	0,802
KabTulangBawang Barat	0,988	0,683
KabWaykanan	0,974	0,642
Kota Metro	0,622	0,985
Kota Bandar Lampung	1,949	2,495

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, data diolah

Tabel 2, menunjukkan sisa anggaran tahun sebelumnya (t-1) menjadi komponen penerimaan pembiayaan terbesar. SiLPAt-1 tahun 2018 anggaran sebelumnya untuk tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan SiLPAt-1 terendah adalah Kabupaten Way Kanan sebesar 0,642 persen, Kabupaten Lampung Barat sebesar 0,771 persen, Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,852 persen, Kabupaten Lampung Utara sebesar 0,980 persen, Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,802 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,683 persen. Sedangkan untuk besaran SiLPAt-1 paling tinggi adalah Kota Bandar Lampung sebesar 2,494 persen dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,194 persen. Jumlah SiLPAt-1 yang ada di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki besaran yang berbeda anggaran dan realisasi yang berbeda di setiap wilayahnya.

Selain faktor SiLPA, serapan anggaran dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Pengertian pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Grafik di bawah adalah gambaran rasio PAD terhadap pendapatan pemerintah Provinsi Lampung yang mencakup 15 Kabupaten/Kota:



Gambar 2. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018 (Dalam persen)

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 6,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Peranan Pemerintah

Peran pemerintah dalam ekonomi sector public berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Kebijakan public diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain. Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk di dalamnya dalam hal pembangunan ekonomi.

2.1.2 Ekonomi Publik

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

2.1.3 Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai stabilizer.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.5 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Penyusunan APBD melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Prinsip penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dikemukakan (Saragih 2003) bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan public adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif. Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut, perlu disusun alur perencanaan anggaran.

2.1.6 Konsep Penyusunan Anggaran

Mengacu pada pernyataan Sugijanto, dkk. (2012:22) dalam Abdul Halim (2016) anggaran pemerintah adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban penyerapan anggaran (Kuncoro 2001).

2.1.7 Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1)

Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran disebut sisa anggaran (SiLPA). Sisa anggaran yang belum terpakai sampai dengan akhir tahun anggaran akan dibawa ke tahun anggaran berikutnya dan menjadi sumber penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (Siregar 2015). SiLPA tahun anggaran sebelumnya (t-1) dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau untuk pengeluaran pembiayaan (investasi dan dana cadangan) pada tahun berjalan (t).

2.1.8 Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt)

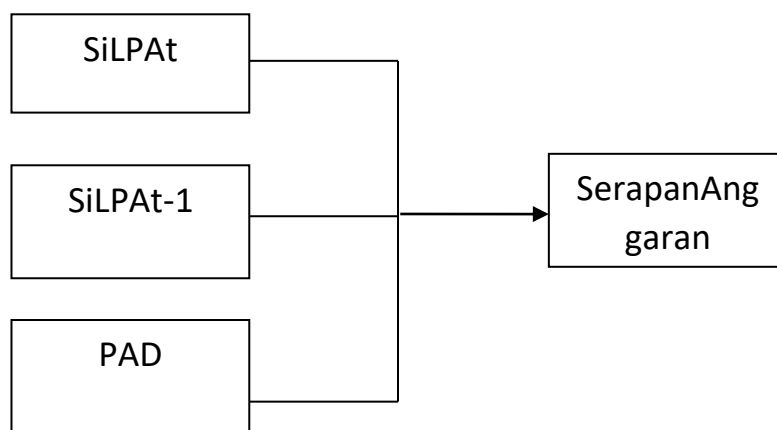
SiLPA pada akhir tahun anggarannya akan menjadi SiLPA pada tahun anggarannya+1 atau tahun anggaran berikutnya. Menurut Halim and Abdullah (2006) Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPAt) merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Besaran nilai sisa anggaran tahun sebelumnya dapat diketahui secara pasti setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya disahkan.

2.1.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah tidak terlepas dari target pendapatan asli daerah yang akan dicapai oleh pemerintah daerah. Dalam penyusunan anggaran belanja, pemerintah daerah selalu memperhitungkan pendapatan asli daerah yang akan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh pemerintah dalam bentuk finansial. Penyerapan anggaran merupakan salah satu dari tahapan siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran rumusan masalah penelitian untuk melihat pengaruh variabel bebas yang mencakup SiLPA, SiLPAt-1, PAD dan Perubahan Anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. landasan teori dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka yang diperoleh dari populasi dan sampel dianalisis dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (*timeseries*) dari periode 2014 – 2018 dan data silang (*crosssection*). Sumber data 15 Kabupaten Kota Provinsi Lampung yang berasal dari hasil publikasi BPS Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia dan lain-lain.

Tabel 3. Variabel Penelitian, Simbol, Satuan Pengukuran, dan Sumber Data

No	Nama Variabel	Simbol Variabel	Satuan Pengukuran	Sumber Data
1	Serapan Anggaran	SA	Persen	DJPk Kemenkeu
2	SiLPAt	SLPt	Persen	DJPk Kemenkeu
3	SiLPAt-1	SLPt-1	Persen	DJPk Kemenkeu
4	Pendapatan Asli Daerah	PADt	Persen	BPS

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$SA_{it} = \beta_0 + \beta_1 SLPt_{it} + \beta_2 SLPt-1_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan :

SA_t = Serapan Anggaran (%)

$SLPt_{it}$ = SiLPAt (%)

$SLPt-1_{it}$ = SiLPA Tahun Sebelumnya (%)

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (%)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

t = Waktu penelitian 2014-2018

β_0 = Konstanta

ϵ_{it} = Error term

Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dari Tahun 2014-2018 dan *data Cross section* yang terdiri dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, kurtosis, dan kemiringan distribusi (*skewness*). Variabel-variabel tersebut, dilakukan pengujian statistik deskriptif dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	Serapan Anggaran (Persen)	SiLPAt (Persen)	SiLPAt-1 (Persen)	PAD (Persen)
Mean	99.64353	1.211403	1.198330	2.106661
Median	100.2090	1.087839	1.076115	0.956518
Maximum	132.3226	3.133237	3.133237	9.992547
Minimum	78.95832	0.371292	0.371292	0.159172
Std. Dev.	9.440523	0.533656	0.527311	2.434133
Skewness	0.330053	1.210889	1.291438	1.665981
Kurtosis	4.139643	4.614768	4.914265	4.978540

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan serapan anggaran selama periode 2014-2018 di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan nilai rata-rata sebesar 99,6%, dengan nilai serapan anggaran di atas rata-rata sebesar 110,98% di Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat sebesar 106,63%, Kabupaten Lampung Barat sebesar 104,35%, Kabupaten Lampung Selatan sebesar 101,63% , Kabupaten Pesawaran sebesar 100,63% dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 99,96% sedangkan kabupaten/kota yang memiliki daya serapan anggaran di bawah rata-rata ada di kota Bandar Lampung sebesar 88,2%. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah.

Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) selama periode 2014-2018 di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung menunjukkan nilai rata-rata 1,211%, dengan nilai Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) di atas rata-rata sebesar 2,51% ada di Kota Bandar Lampung sebesar 1,63% dan Kabupaten Mesuji sebesar 1,58% sedangkan untuk nilai Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) dibawah rata-rata ada di Kabuapten Lampung Barat sebesar 0,72% dan Kabupaten Waykanan sebesar 0,76%. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya terutama pada pembiayaan daerah.

Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) selama periode 2014-2018 di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung dengan nilai rata-rata Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) sebesar 1,19%, dengan nilai Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) di atas rata-rata sebesar 2,25% ada di kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1,52% Kabupaten Tanggamus sebesar 1,51%, Kabupaten Pesawaran sebesar 1,45% dan Kabupaten Mesuji sebesar 1,43% sedangkan untuk nilai Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) di bawah rata-rata ada di Kabuapten Lampung Barat sebesar 0,75% dan Kabupaten Waykanan sebesar 0,77%. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah APBD di setiap daerah dan kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan (PADt) selama periode 2014-2018 di 15 kabupaten/kota provinsi lampung dengan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan (PADt) sebesar 2,10%, dengan nilai PAD diatas rata-rata ada di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 6,66%, Kabupaten Waykanan sebesar 6,62%, Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,84%, Kabupaten

Lampung Utara sebesar 2,51%, Kota Bandar Lampung sebesar 2,23% dan Kota Metro sebesar 2,84% sedangkan untuk nilai PAD di bawah rata-rata ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,29% dan Kabupaten Mesuji sebesar 0,31%. Adanya kesenjangan nilai ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya setiap daerah dan kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD yang ada.

4.1.2 Hasil Estimasi Regresi Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Lampiran 5, diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,987463 lebih besar dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

	SLPT	SLPT_1	PAD
SLPT	1.000000	0.527991	-0.150036
SLPT_1	0.527991	1.000000	-0.004455
PAD	-0.150036	-0.004455	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Dari uji multikolinieritas yang telah dilakukan dihasilkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,85 [Widarjono \(2018\)](#) maka dari itu hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pada variabel yang digunakan tidak ada multikolinieritas atau dengan kata lain tidak ada hubungan yang linier antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Terikat	Chi Square Hitung	Chi Square Tabel	Kesimpulan
1	20,851	7,814	tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Pada tabel 6 ditunjukkan bahwa Chi Square hitung (20,851) > Chi Square Tabel (7,814) pada df sebesar variabel bebas = 4 dan tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti menerima H_0 maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam persamaan.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Dari hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson stat sebesar 2.070373 sedangkan untuk nilai $dL = 1,5709$ dan $dU = 1,6802$ ($n = 50$, $k = 4$ dengan $\alpha = 5\%$). Sehingga dapat dituliskan $dU (1,6802) < DW (2,070373) < 4 - dU (2,3198)$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah auto korelasi.

4. Uji Signifikansi Model

Pemilihan model penelitian ditentukan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji Chow digunakan untuk membandingkan metode *Common Effect Model* (CEM) dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM), kemudian dilanjutkan dengan Uji Hausman dengan cara membandingkan metode *Random Effect Model* (REM) dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM), dan yang terakhir yaitu Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dengan membandingkan metode *Random Effect Model* (REM) dengan metode *Common Effect Model* (CEM).

5. Hasil Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model pendekatan yang paling baik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* dengan melihat nilai distribusi F statistik. Apabila nilai probabilitas distribusi F statistic lebih dari nilai tingkat signifikansi yang ditentukan maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* dan jika nilai probabilitas distribusi F statistic

kurang dari tingkat signifikansi maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (Widarjono 2018).

Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria :

Chi-square hitung < *Chi-square* kritis = Terima H_0

Chi-square hitung > *Chi-square* kritis = Terima H_a

Tabel 7. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.514766	(14,57)	0.0073
Cross-section Chi-square	36.073638	14	0.0010

Sumber: Hasil OlahanEviews 9

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section* F sebesar 0,0010 lebih kecil dari taraf nyata (α) 5 persen, ($0,0010 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan menerima H_a sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari pada metode *Common Effect Model* (CEM) untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

6. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan dan memilih antara *Random Effect* (REM) dan *Fixed Effect* (FEM). Uji ini menggunakan nilai *Chi-Squares* dalam menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria :

Chi-square hitung < *Chi-square* kritis = Terima H_0

Chi-square hitung > *Chi-square* kritis = Terima H_a

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.251777	3	0.0104

Sumber: Hasil OlahanEviews 9

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,0104 lebih kecil dari taraf signifikansi α sebesar 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa metode *fixed effect* (FEM) lebih baik digunakan daripada metode *random effect* (REM) dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil Uji Chow yang menghasilkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan hasil Uji Hausman yang menghasilkan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Maka *Fixed Effect Model* (FEM) yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini.

7. Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi dengan model *Fixed Effect Model* seperti Lampiran 4, maka menghasilkan hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: SA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/28/20 Time: 14:34
 Sample: 2014 2018
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	117.9973	5.227604	22.57197	0.0000
SLPT	-15.73498	2.912745	-5.402115	0.0000
SLPT_1	-2.289031	2.202724	-1.039182	0.3031
PAD	1.637953	0.582889	2.810058	0.0068
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.634067	Mean dependent var	99.64353	
Adjusted R-squared	0.524929	S.D. dependent var	9.440523	
S.E. of regression	6.506917	Akaike info criterion	6.789172	
Sum squared resid	2413.379	Schwarz criterion	7.345369	
Log likelihood	-236.5939	Hannan-Quinn criter.	7.011255	
F-statistic	5.809777	Durbin-Watson stat	2.070373	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan EViews 9

Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan bahwa variabel SiLPAt dan PAD yang berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran, sedangkan variabel SiLPAt-1 berpengaruh tetapi tidak signifikan. Dengan model regresi sebagai berikut:

$$SA_{it} = 117,9973 - 15,7349SLPT_{it} - 2,2890SLPT_{-1it} + 1,6379PAD_{it}$$

Interpretasi dari persamaan model regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koefisien konstanta sebesar 117,9973, hal ini menunjukkan bahwa jika tanpa adanya seluruh variabel bebas Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PADt), maka Serapan Anggaran di 15 kabupaten kota provinsi Lampung mencapai 117,9973%.

Koefisien Sisa Anggaran tahun ini (SLPt) adalah -15,7349, Sisa Anggaran tahun ini berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil tersebut bahwa jika terjadi peningkatan SiLPAt sebesar 1% di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, maka akan mengasumsi Serapan Anggaran turun sebesar 15,73%.

Koefisien Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPt-1) adalah -2.289031, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya tidak berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPt-1) tidak mempengaruhi Serapan Anggaran.

Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tahun berjalan adalah 1.637953, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Serapan Anggaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1%, maka meningkatkan Serapan Anggaran sebesar 1,63% *ceteris paribus*.

4.1.3 Pengujian Hipotesis Statistik

Pengujian Hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian dan mengetahui keakuratan data dengan melakukan uji-t, uji F dan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji-t Parsial

Uji-t bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini uji-t dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat kebebasan $n-k-1$ (n = jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas).

Tabel 10. Hasil Uji-t Statistik

Variable	t-Statistic	t-Tabel	Keterangan
SLPT	-5.402.115	1,6666	H_0 ditolak
SLPT_1	-1.039.182	1,6666	H_0 diterima
PAD	2.810.058	1,6666	H_0 ditolak

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung.

1) Pengaruh SiLPAt terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar -5.402115 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,6666. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabel. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Sisa Anggaran Tahun ini (SiLPAt) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung.

2) Pengaruh SiLPAt-1 terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar -1.039182 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,6666. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih kecil daripada nilai t-tabel. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Sisa Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPAt-1) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Serapan Anggaran di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung.

3) Pengaruh PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel menunjukkan nilai t-statistik variabel sebesar 2.810058 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,666. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabel. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode t secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung.

b. Uji F Statistik

Uji-F bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara Bersama terhadap variabel terikat. Uji-F ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan dengan tingkat kebebasan $df_1 = k$ dan $df_2 = n-k-1$ (n = jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas).

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil nilai F-statistik sebesar 5.809777 dan nilai F-tabel sebesar 3,12. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai F-statistik lebih besar dibandingkan dengan F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya SiLPAt, SiLPAt-1 dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa baik garis regresi cocok dengan data nya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi dengan menggunakan konsep koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi 0.634067 atau 63,40%. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPAt, SiLPAt-1 dan PAD mampu menjelaskan varian Serapan Anggaran sebesar 63,40% dan sisanya 36,60% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

4.2 Pembahasan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran sedangkan variabel Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, ini ditunjukkan pada nilai probabilitas yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Koefisien determinasi 0,638658 atau 63,86%. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) mampu menjelaskan varian serapan anggaran sebesar 63,86% dan sisanya 36,14% adalah faktor-faktor lain.

Penelitian selanjutnya mengatakan bahwa PAD menggambarkan total pendapatan dari suatu daerah, semakin tinggi PAD maka potensi di suatu daerah semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa PAD yang tinggi akan meningkatkan total pendapatan suatu daerah sehingga semakin baik serapan anggarannya. Hal ini sesuai dengan penelitian [Halim and Abdullah \(2006\)](#), [Arif \(2016\)](#) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh [Rambe \(2018\)](#) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran.

Namun jika data tersebut diperlihatkan dengan *Cross-section Fixed Effect* maka akan berbeda efeknya untuk setiap masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018. Berikut hasil dari *Cross-section Fixed Effect*.

Tabel 11. Hasil Uji Individual effect

CROSSID	Effect	Individual Effect
Kab Lampung Barat	-1,68363	116,313668
Kab Lampung Selatan	-1,3113	116,685998
Kab Lampung Tengah	-5,96331	112,033993
Kab Lampung Timur	-0,89756	117,009743
Kab Lampung Utara	-2,64193	115,355373
Kab Mesuji	5,291438	123,288738
KabPesawaran	7,83488	125,83218
KabPringsewu	1,931328	119,928628
KabPesisir Barat	4,892698	122,889998
KabTanggamus	4,562023	122,559323
KabTulang Barat	-6,73723	111,260069
KabTulangBawang Barat	-5,29939	112,697913
KabWaykanan	-16,0757	101,92161
Kota Metro	4,916004	122,913304
Kota Bandar Lampung	11,18167	129,17897

Sumber: Hasil Olahan Eviews 9

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *fixed effect* dari setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki nilai masing-masing yang berbeda. rata-rata Kabupaten/kota yang memiliki efek terbesar dari serapan anggaran. Nilai *fixed effect* ini menunjukkan seberapa besar perbedaan komponen

kesalahan *fixed* dengan intersep rata-rata dari seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah persamaan regresi dari nilai *fixed effect* pada Kabupaten/kota dalam penelitian ini:

Persamaan regresi Kota Bandar Lampung:

$$SA = 129,1789 - 15,7349SLPit - 2,2890SLPt-1it + 1,6379PADit$$

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung terdapat 6 Kabupaten/kota dengan nilai *Fixed Effect* yang positif atau nilai tertinggi lebih besar dari 120 persen yaitu Kota Bandar Lampung memiliki nilai *Fixed Effect* sebesar 129,1789, nilai ini dapat diartikan bahwa Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap serapan anggaran sebesar 129,17%, Kabupaten Pringsewu dengan *effect* sebesar 125,83218 persen, Kabupaten Mesuji dengan *effect* sebesar 123,28887 persen, Kabupaten Pesisir Barat dengan *effect* sebesar 122,88999 persen, Kabupaten Tanggamus dengan *effect* sebesar 122,5593 persen dan Kota Metro dengan *effect* sebesar 122,91330 persen.

Hal inimenunjukkan bahwa Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah variabel yang dapat membantu peningkatan daya serap anggaran di Kabupaten/kota Provinsi Lampung periode 2014-2018.

Persamaan nilai regresi KabupatenWaykanan:

$$SA = 101,92161 - 15,7349SLPit - 2,2890SLPt-1it + 1,6379PADit$$

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung terdapat 9 Kabupaten/kota dengan nilai *Fixed Effect* yang negative atau nilai terendah kurangdari 120 persen yaitu Kabupaten Waykanan memiliki nilai *Fixed Effect* sebesar 101,92161, nilai ini dapat diartikan bahwa Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menekan Kabupaten Waykanan dalam meningkatkan daya Serapan Anggaran sebesar 101,92%. Begitu juga dengan Kabuapten/kota lainnya yang memiliki efek nilai negative dari hasil uji *Croos Section Fixed Effect* yaitu Kabupaten Lampung Barat dengan *effect* sebesar 116,31366 persen, Kabupaten Lampung Selatan dengan *effect* sebesar 116,68599 persen, Kabupaten Lampung Tengah dengan *effect* sebesar 112,03399 persen, Kabupaten Lampung Timur dengan *effect* sebesar 117,00974 persen, Kabupaten Lampung Utara dengan *effect* sebesar 115,35537 persen, Kabupaten Pringsewu dengan *effect* sebesar 119,92862 persen, Kabupaten Tulang Bawang dengan *effect* sebesar 111,2600 persen dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan *effect* sebesar 112,6979 persen.

4.2.1 Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt) terhadap Serapan Anggaran

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Sisa Anggaran Tahun Berjalan berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran. Hasil uji statistik t atas pengaruh variabel SiLPAt terhadap penyerapan anggaran menunjukan bahwaSiLPAt berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang dapat dilihat dengan nilai $\text{sig} < \alpha$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara parsial, SiLPAt pada periode tahun berjalan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien SiLPAt -15.73498 bertanda negatif yang berarti bahwa semakin besar SiLPAt maka akan semakin menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Lampung disebabkan kurang baiknya penganggaran pendapatan yang benar-benar mungkin direalisasikan dan belanja yang benar-benar dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan, sehingga pada akhir tahun anggaran terjadi varian anggaran atau SiLPAt yang cukup besar yang secara negative mempengaruhi serapan anggaran.

4.2.2 Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1) terhadap Serapan Anggaran

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sisa anggaran tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji statistik t atas pengaruh variabel sisa anggaran tahun sebelumnya terhadap penyerapan anggaran menunjukan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang dapat dilihat dengan nilai $\text{sig} \geq \alpha$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa secara parsial, sisa anggaran tahun

sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun uji koefisien sisa anggaran tahun sebelumnya -2.289031 bertanda negatif yang berarti bahwa makin besar sisa anggaran tahun sebelumnya akan makin menurunkan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat bahwa dari 15 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya beberapa kabupaten/kota yang mampu mencapai target anggaran pendapatan yang ditetapkan atau memiliki daya serap anggaran yang rendah.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Lampung disebabkan kurang baiknya penganggaran. Di mana pemda kurang cermat dalam menyusun program kegiatan atau tidak adanya program cadangan sehingga dengan banyaknya sisa anggaran dan pencairan dana di pertengahan tahun menyebabkan pemda kewalahan dalam pengelolaan anggarannya atau kurang efektifnya pemanfaatan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Pada hakikatnya dengan sisa anggaran di tahun sebelumnya pemda sudah harus memiliki rencana atau kegiatan yang pasti terealisasi pada periode tahun berjalan tersebut karena sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan uang yang pasti dimiliki oleh setiap pemda. Sehingga diharapkan lebih efektifnya pemanfaatan anggaran belanja pemerintah daerah. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target maka pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja birokrasi yang buruk.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Serapan Anggaran

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah PAD berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil uji statistik t atas pengaruh variabel PAD terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran yang dapat dilihat dengan nilai $\text{sig} < \alpha$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara parsial, PAD berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien PAD 1.637953 bertanda positif di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan asli daerah 1 persen, maka akan meningkatkan serapan anggaran sebesar 1,63 persen *ceteris paribus*.

Untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat bahwa dari 15 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki rasio PAD paling tinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 6,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio PAD yang paling baik disbanding kabupaten/kota lain. Tinggi nya rasio PAD Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, Kabupaten Mesuji memiliki rasio kemandirian paling rendah yaitu 0,16 persen.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sisa Anggaran tahun berjalan (SiLPAt) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.
2. Sisa Anggaran tahun sebelumnya (SiLPAt-1) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tahun amatan penelitian selama 5 (lima) tahun anggaran (2014-2018).
2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung (15 Kabupaten/Kota).

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu: Sisa Anggaran Tahun Berjalan (SiLPAt), Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAt-1), Pendapatan Asli Daerah, dan Serapan Anggaran.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka ada beberapa saran dimana Belanja dan Pembiayaan Daerah memerlukan sumber pendapatan daerah yang pasti (*certainty*), di antaranya sebagai berikut:

1. SiLPA yang bertambah di tahun-tahun berjalan dan tidak diantisipasi oleh pengelola anggaran menyebabkan tidak efisien, sehingga perlu adanya kepastian anggaran.
2. Pengelola anggaran harus memiliki berbagai cadangan rencana belanja, sehingga ketika ada tambahan anggaran yang mendadak dapat diinformasikan untuk melaksanakan rencana belanja yang tertunda tersebut.
3. Dari sisi pelaksanaan APBD pemerintah seharusnya dapat melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana. Apabila terdapat perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut (diberlakukan pada tahun berikutnya) karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan/penyerapan anggaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep Dan Aplikasi Dari, Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, Emkhad. 2016. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011." 1–23.
- BPKP. 2011. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, and Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1):53–64.
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Analisis Spasial Dan Regional*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maini, Ruh, Syukriy Abdullah, and Zuraida Zuraida. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung Skpd Di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 8(1):54–65. doi: 10.22373/jep.v8i1.68.
- Rambe, Fadlina Almi. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Indonesia, Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia.
- Siregar, Syofian. 2015. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertasi Panduan EViews*. 5th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.